

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pertimbangan Majelis KPPU terhadap penentuan denda keterlambatan notifikasi akuisisi dan untuk mengetahui dampak inkonsistensi denda keterlambatan notifikasi akuisisi terhadap hukum persaingan usaha. Metode Penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif. Hasil penelitian adalah pertimbangan komisioner KPPU dalam memutuskan besaran denda yang menimbulkan Inkonsistensi dalam perkara keterlambatan lapor akuisisi saham adalah faktor daripada penegak hukum itu sendiri. Majelis Komisioner yang dalam hal ini bertindak sebagai instansi yang diberikan kewenangan dalam menjatuhkan sanksi denda pada tingkat pertama tentunya diberikan kewenangan seluas-luasnya untuk memberikan sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang melakukan pelanggaran persaingan usaha. Dalam hal ini adanya aturan batas bawah dan batas atas yang tercantum dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Sanksi Administratif tentu membuka peluang terjadinya penjatuhan sanksi denda yang berbeda-beda. Dengan adanya aturan batas atas dan batas bawah tersebut tentu menjadikan KPPU diberikan keluasaan untuk bergerak menentukan denda yang paling tepat dan 2.dampak utama yang dapat diidentifikasi dari Inkonsistensi dalam penerapan denda atas keterlambatan notifikasi sebagai berikut Ketidakpastian Hukum, Pengurangan Kepatuhan Pelaku Usaha, Tantangan Bagi Efektivitas Hukum Persaingan Usaha, Pelemahan Kredibilitas Otoritas Pengawas, Dampak Ekonomi, Peluang Penyalahgunaan Dikresi.

Kata Kunci : *Inkonsistensi, Putusan Denda Keterlambatan, Akuisisi, KPPU*

ABSTRACT

The purpose of this study is to determine the considerations of the KPPU Assembly regarding the determination of fines for late notification of mergers, acquisitions, and consolidations and to determine the impact of inconsistent fines for late notification of mergers, acquisitions, and consolidations on competition law. The research method used is the normative legal method. The results of the study are the considerations of the KPPU commissioners in deciding the amount of fines that cause inconsistencies in cases of late reporting of share acquisitions are factors of the law enforcers themselves. The Board of Commissioners, which in this case acts as an agency that is given the authority to impose fines at the first level, is certainly given the broadest authority to impose administrative sanctions on business actors who violate business competition. In this case, the existence of the lower and upper limits stated in Article 47 of Law Number 5 of 1999 concerning Administrative Sanctions certainly opens up the opportunity for the imposition of different fines. With the existence of the upper and lower limit rules, the KPPU is certainly given the freedom to move to determine the most appropriate fines and 2. the main impacts that can be identified from Inconsistency in the application of fines for late notification as follows: Legal Uncertainty, Reduction in Business Actor Compliance, Challenges for the Effectiveness of Competition Law, Weakening the Credibility of Supervisory Authorities, Economic Impact, Opportunities for Abuse of Discretion.

Keywords: *Inconsistency, Late Fine Decisions, Mergers, Acquisitions, and Consolidations, KPPU*